

PEREMPUAN DAN ANAK – PELINDUNGAN – PEMBERDAYAAN

2024

PERDAKAB. SUMEDANG NO.5, LD 2024/NO.5. TLD NO. 46, HLM 65

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

ABSTRAK : - Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu implementasi kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang menjadi kesatuan dimensi integral mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan atas kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan daerah. Guna mewujudkan kepastian hukum dan memberikan jaminan perlindungan hukum serta sinergitas dan keterpaduan dalam pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016; UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 10 Tahun 2012; UU No. 10 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 14 Tahun 2019; UU No. 12 Tahun 2022; PP No. 4 Tahun 2006; PP No. 9 Tahun 2008; PP No. 59 Tahun 2019; PP No. 78 Tahun 2021; PERPRES No. 18 Tahun 2014; PERPRES No. 75 Tahun 2020.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, dan kewenangan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, perlindungan anak, peningkatan kualitas keluarga, dan sistem data gender dan anak. Kerjasama Daerah dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Fasilitasi atas partisipasi masyarakat oleh Perangkat Daerah. Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah.

CATATAN

- : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juli 2024.
- Peraturan Bupati yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.